

ARTI DAN JEJAK YANG DITINGGALKAN

Semua kebenaran selalu melewati 3 tahapan, Pertama dicerca, kedua ditentang, dan ketiga akhirnya diterima sebagai suatu kebenaran (Arthur Schopenhauer, 1788-1860). Demikian pula Pak Harto.

Dalam logika sederhana, kebenaran adalah fakta, dan fakta itu adalah bukti — bukan prasangka. Logika sederhana ini - menurut pemahaman saya - adalah logika rakyat. Apa yang tampak, apa yang didapat, dan apa pula yang dirasakan oleh rakyat, substansinya adalah bukti atau kebenaran. Tanpa itu, tentu kita akan terperangkap dalam prasangka, praduga, dan aneka asumsi serta analisis yang belum tentu nyambung dengan logika rakyat (baca: logika yang sederhana).

Adalah Bung Karno yang pernah mengatakan Jas Merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena sejarah adalah guru yang terbaik, dan sejarah itu pula yang banyak mengajarkan pada kita - sekaligus menyadarkan - baik dan buruknya langkah kita ke depan. Bagaimana seharusnya. Seorang pemimpin, tentulah harus belajar kepada para pemimpin sebelumnya, karena sebuah kesinambungan memang sangat diperlukan. Terlebih lagi kesinambungan yang menyangkut peningkatan kesejahteraan untuk rakyat.

Terlepas dari kekhilafan yang ada, apapun namanya Pak Harto adalah sosok yang pernah memimpin dan mem-bangun negeri ini dengan susah payah. Dan adalah sangat tidak adil jika Pak Harto yang telah uzur, renta, dan sakit-sakitan mendapat perlakuan yang tidak sebanding dengan apa yang telah ia lakukan untuk rakyat dan bangsa ini. Sebab memang ada banyak hal yang telah ia lakukan dan abdikan untuk bangsa dan republik ini. Dan ini adalah realita yang tak terbantahkan karena ada jejak dan bukti-bukti yang telah memberi arti bagi pembangunan negeri ini.

Seperti juga manusia biasa - juga kita semua — tentulah Pak Harto dilahirkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Termasuk juga dalam segi kepemimpinannya. Namun, kini orang tak pernah lagi melihat apa-apa saja kelebihan Pak Harto, atau apa saja yang telah dibangun oleh Pak Harto selama ini. Seolah kepemimpinan Pak Harto hanya berhenti sampai disitu. Sebagaimana Probosutedjo kemukakan;

Memang sayangnya, kepemimpinan Pak Harto yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, tidak lagi diteruskan dan diikuti oleh para pemimpin setelahnya. Bahkan UUD 1945 yang jelas-jelas menjadi pedoman bangsa telah diubah berulang kali dan diamandemen. Kenapa UUD 1945 diubah? Bukankah UUD 1945 tersebut

adalah yang paling cocok untuk bangsa Indonesia yang multi majemuk ini? Bukankah kita telah memiliki Pancasila ?

Ibarat pepatah tak pandai menari, dikatakan lantai berjungkit. Sebetulnya, bukan UUD nya yang salah, melainkan kita tidak melaksanakannya dengan baik dan benar. Kalau saja UUD 1945 dan Pancasila kita laksanakan dengan baik, penuh kesadaran, konsekwen, dan penuh tanggung jawab, saya kira semua persoalan bisa kita selesaikan.

Yang namanya Pancasila, demikian Probosutedjo mengatakan, dibuat oleh Bung Karno sebagai fondasi atau landasan untuk menjawab tantangan masa depan bangsa. Kemudian oleh Pak Harto dikokohkan sebagai falsafah atau ideologi bangsa, sebagai alat pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan golongan. Sadar atas kamajemukan itulah Pak Harto menempatkan Pancasila sebagai cara hidup, cara pandang, dan cara tindak semua warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk juga di dalamnya masalah demokrasi, tetaplah merujuk pada Pancasila. Tak ada yang lain.

Maka dengan kata lain, sesungguhnya Pak Harto banyak belajar pada Bung Karno, dan tetap meneruskan apa-apa yang baik pada Bung Karno. Nasionalisme tumbuh menjadi kebanggaan berbangsa pada era Bung Karno, diteruskan oleh Pak Harto hingga menjadi negara pembangunan yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Ada pembangunan yang berkelanjutan antara Bung Karno dan Pak Harto.

Lantas, bagaimana sekarang ? Perubahan besar memang terjadi setelah Pak Harto lengser. Namun, persoalannya apakah perubahan itu menjadikan bangsa ini lebih baik ? Apakah perubahan itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat ? Apakah para pemimpin sekarang mau belajar pada para pemimpin sebelumnya ? Nah, ini soalnya.

Padahal, apa - apa yang baik perlu kita ambil. Apa yang buruk perlu kita buang. Apa yang telah dibangun oleh Pak Harto dengan baik untuk bangsa ini harus kita teruskan. Apa yang masih kurang perlu kita perbaiki dan sempurnakan. Karena semua ini semata-mata untuk kesinambungan kemajuan bangsa ini. Bukankah kita semua ingin melangkah maju ke depan, dan bukan untuk mundur ke belakang ?

Kita tahu, hakekat dari Reformasi 1998 adalah sebuah perbaikan: tata ulang. Yang kurang diperbaiki atau disempurnakan, yang buruk dibuang, dan yang baik tetap dipertahankan. Jadi, intinya reformasi bukanlah sebuah kesimpang siuran. Bukan sebuah prakiraan. Juga, bukan prasangka dan tuduhan. Lebih-lebih sebuah ajang pem-balasan dendam dan konflik berkepanjangan.

Kalau Bung Karno dan Pak Harto bisa memimpin bangsa ini cukup lama, adalah bukti keduanya sesungguhnya didukung (baca: dipercaya) rakyat cukup lama pula. Keduanya, pemimpin bangsa yang visioner yang berpikir ke depan. Tahu kemana bangsa ini harus melangkah. Mampu membangun kebanggaan, kesejahteraan, dan persatuan dari keanekaragaman nusa, bangsa, dan bahasa dalam bingkai NKRI dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Keduanya juga bukan pemimpin tebar pesona, melainkan pemimpin tebar karya. Dan karya-karya itu adalah bukti, dan bukti itu adalah fakta-fakta yang mudah dicerna oleh logika rakyat yang sederhana.

Bahwa ada hal-hal yang harus dilihat secara jernih, jujur dan terbuka. Orang boleh saja tidak setuju atau kontra terhadap Pak Harto, namun orang-orang juga boleh setuju, setia, loyal dan tetap mencintai Pak Harto selaku pemimpinnya. Sebuah kesetiaan yang sesungguhnya bukan sekadar setia kepada sang pemimpin, melainkan juga kesetiaan yang bertolak dari bukti-bukti yang diberikan oleh pemimpin itu sendiri.

Maka, dari segi inilah kepemimpinan Pak Harto memiliki jejak yang berarti bagi rakyat banyak. Memiliki bukti-bukti yang ditinggalkannya, dan karena itu ia akan tetap dikenang dan dicintai oleh rakyat yang pernah merasakan dan menikmati bukti-bukti itu.

Kalau pun Pak Harto pernah didaulat sebagai Bapak Pembangunan, sebetulnya itu pun tidak salah lantaran memang banyak pembangunan yang telah dilakukan Pak Harto. Bahkan di zaman Bung Karno pun, pembangunan juga telah dilakukan dan ada bentuknya. Kita tentunya masih ingat, dengan hasil pampasan perang dari Jepang dalam Perang Dunia II, bagaimana Bung Karno membangun Monumen Nasional, gedung Sarinah, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, gedung DPR/MPR (belum selesai), Masjid Istiqlal (belum selesai), hotel Samudra Beach, Bali Beach, hotel Ambarukmo, Gelora Bung Karno Senayan, dan beberapa lainnya.

Lalu, apa-apa pembangunan yang belum selesai di era Bung Karno, kemudian diteruskan, disempurnakan, dan diselesaikan oleh Pak Harto seperti masjid Istiqlal, gedung DPR/MPR, Gelora Bung Karno Senayan, dan beberapa lainnya. Sementara pembangunan di era Pak Harto lebih marak lagi. Ada banyak pembangunan di sana-sini, baik dalam bentuk supra maupun infrastruktur. Mulai dari jalan Tol, Bandara Soekarno Hatta, SD Inpres, Banpres, bahkan sampai — hampir semua gedung departemen dibangun — lebih dari 40 kementerian di Jakarta sangat megah dan luas. Padahal, sebelumnya, kementerian banyak menggunakan gedung-gedung tua peninggalan Belanda. Bahkan, di era Pak Harto lah para menteri dan pejabat tinggi negara dibangun rumah-rumah dinas.

Sementara di sektor pertanian, dibangun pelbagai pabrik pupuk, waduk, dan irigasi, dan semua hal yang terkait dengan pembangunan pertanian. Dan masih banyak lagi yang dibangun Pak Harto, diantaranya Satelit Palapa, transmigrasi, Keluarga Berencana, Swa Sembada Pangan, Perumahan Rakyat, Posyandu, dan alangkah banyaknya jika sebutkan satu persatu yang notabene masih segar dalam ingatan rakyat

Lantas, pembangunan apa saja yang dilakukan setelah Bung Karno dan Pak Harto ? Pembangunan apa yang ada pada era Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Mega, dan sekarang era Presiden SBY ? Pada era presiden BJ Habibie, misalnya, ada euforia reformasi dan kebebasan yang kebablasan. Pancasila nyaris dilupakan. Bahkan, Timtim, salah satu propinsi termuda Republik ini, yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa sejak 1976 lepas begitu saja.

Di era Presiden Gus Dur ada situasi politik tak menentu dimana angin kebebasan bertiup lebih kencang sampai-sampai - atas nama demokratisasi dan HAM - Gus Dur memberi angin bangkitnya kembali komunisme di tanah air. Terbukti, munculnya berbagai penerbitan buku berbau komunis kendati TAP MPRS No 33/1976 tentang larangan penyebaran ajaran Komunis di Indonesia belum dicabut.

Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan sisa waktu menggantikan Gus Dur, juga tidak sempat berbuat dan membangun apa-apa. Kemudian sekarang di era Presiden SBY, pembangunan pun masih tanda tanya. Sebab hingga sekarang belum terlihat, pembangunan apa yang dilakukan SBY yang besar manfaatnya bagi rakyat ?

Pembangunan di era SBY yang membanggakan adalah pemberantasan korupsi. Dan itu pun masih merupakan sebuah proses. Dan lagi, pemberantasan korupsi yang dilakukan pun, masih terkesan tebang pilih. Apa benar SBY bisa menghapus korupsi hingga ke akar-akarnya mengingat kultur "kebebasan" yang kebablasan telah terbangunkan lewat reformasi dimana prilaku budaya warga bangsa telah berubah, dimana budaya malu, budaya sopan santun, dan budaya tanggung jawab, etika, sudah terkalahkan oleh hingar bingar kepentingan politik dan kekuasaan semata.

Adanya perlakuan dan tuduhan terhadap Pak Harto -yang menjarah uang negara dan memperkaya diri dan menyimpan kekayaannya di luar negeri — seharusnya menurut Probosutedjo, adik Pak Harto, pemerintah segera melacaknya kekayaan Pak Harto tanpa tedeng aling-aling. Bila perlu dicari di seluruh dunia. Kalau memang ternyata ada dan kedapatan harta Pak Harto disimpan di luar negeri, ya harus diminta. Tetapi, kalau tidak ada dan tidak terbukti, maka seharusnya pula Pak

Harto harus dibebaskan dari berbagai tuduhan. Namanya harus dibersihkan. Ini penting, karena agar seluruh bangsa Indonesia dapat belajar untuk menghargai para pemimpinnya. Termasuk juga peng-hargaan dan apresiasi terhadap Pak Harto.

Ini karena kita tahu. Bahwa sesungguhnya memang ada banyak "ilmu" yang bisa ditimba dari Pak Harto. Menurut Probosutedjo, kelebihan Pak Harto adalah segi manajemen yang dibuat oleh Pak Harto. Dulu Bung Karno juga mempunyai blue print pembangunan. Demikian pula Pak Harto, kita mengenal ada yang namanya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai panduan. Lalu, ada yang namanya Bapennas, dimana semua pekerjaan ada di situ. Tetapi sekarang Bapennas tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sejak era Presiden BJ Habibie hingga SBY sekarang, banyak sekali perubahan yang terjadi. Dan uniknya, perubahan itu sama sekali tidak menyentuh pada pembangunan kesejahteraan rakyat, atau bagaimana bangsa ini bisa maju ke depan, selain bersikutat melulu dalam perkara politik dan kekuasaan - yang notabene bersifat sesaat. Rakyat pun tertinggalkan dengan konsep pembangunan yang belum jelas, kemana sesungguhnya bangsa ini diarahkan.

Sekarang ini, kata Probo lagi, semua orang sudah merasa pintar. Ibarat pepatah; Tak ada elang, akulah elang, kata belalang. Banyak belalang mengaku elang. Padahal, Elangnya sudah tak ada, dan sang belalang pun berani-beraninya mengaku elang. Itulah yang kita saksikan sekarang. Atau kata Probosutedjo lagi menambahkan;

Setelah demokrasi liberal ala barat diterapkan, kini banyak orang yang merasa pintar, banyak orang yang merasa bisa, tapi dia sendiri tidak mau menyadari sampai dimana kepintarannya dan kebisaannya. Seperti halnya pepatah jawa, sok rutnongso biso, ora biso rumangsani. Banyak orang yang hanya mengandalkan dan mencari popu-laritasnya belaka. Banyak orang yang sok rumongso, namun tak mau berkaca diri: mampukah saya ? Nah, kalau orang-orang model begini yang memimpin, apa jadinya bangsa ini kelak ?

Pertanyaan apa jadinya bangsa ini ke depan, tentulah bukan pertanyaan milik satu dua orang, melainkan milik semua rakyat yang berpikir dan peduli atas nasib bangsa ini di masa mendatang. Termasuk juga Pak Harto, yang pada hari-hari tuanya masih sangat mencintai dan peduli atas nasib rakyat, nasib orang miskin, terutama para petani yang tersebar di seantero pelosok negeri ini.

Kepada adiknya, Probosutedjo, bahkan Pak Harto selalu berpesan agar selalu memperhatikan mereka. Pesan Pak Harto itulah yang terus diingat Probosutedjo, hingga akhirnya ia kini mencoba mengangkat nasib para petani dengan cara

bekerjasama dengan mereka. Memberikan mereka pupuk organik, memberikan modal kerja, dan jika telah panen bisa berbagi hasil. Dengan nama Pak Harto Center, kini sudah ribuan petani, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta ikut ambil bagian untuk bersama-sama membangun pertanian. Bahkan kini, lebih 1000 para petani telah siap pula untuk bergabung. "Dan kalau kita bangkitkan kembali semangat bertani, saya yakini dalam tempo singkat kita akan kembali pada era swa sembada beras seperti zaman Pak Harto," ungkap Probosutedjo lagi.

Dulu, kata Probosutedjo lagi, sejak usia 27 tahun Bung Karno gigih memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Pada tahun 1930 Bung Karno sudah memperjuangkan nasib para petani yang dikenal dengan perjuangan kaum marhaen. Marhaen adalah petani miskin yang tidak memiliki sawah yang cukup luas, tetapi memiliki alat pertanian, yakni bajak dan kerbau yang dapat digunakan untuk mencari upah sebagai buruh tani. Nah, kenapa pula hal ini tak diper-hatikan ?

Memang benar. Di negara agraris ini, di negara pertanian ini, di negara penghasil beras ini, adalah sangat tak masuk di akal jika akhirnya kita justru jadi negeri pembeli dan pengimpor beras dari negara-negara lain. Dan alangkah anehnya bila para pemimpin negeri ini sekarang lebih memilih mengimpor beras (baca: konsumtif) ketimbang membangun pertanian dan upaya swasembada beras (baca: produktif). Dan alangkah naifnya, bila kita memilih menjadi bangsa yang konsumtif ketimbang bangsa yang produktif.

Membangun Karakter Bangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki la-tarbelakang budaya dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Karena itu, dengan menyadari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia - terdiri dari lebih 13000 pulau, aneka suku bangsa, bahasa, adat istiadat - maka diperlukan sebuah alat pemersatu bangsa. Juga, sejarah telah mencatat peristiwa Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 - satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa - adalah sebuah komitmen penting yang luar biasa dari sejumlah besar para pemuda untuk menyatukan diri dalam negara kesatuan Indonesia. Karena itu, karakter bangsa Indonesia tentulah bukan karekturnya orang Amerika, bukan karakternya orang Inggris, bukan orang Rusia, Cina, Arab ataupun karakter

orang Yahudi, melainkan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan tersirat dalam Pancasila guna menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Seperti kita ketahui, para founding fathers Republik ini Bung Karno, Bung Hatta, M. Yamin, Ki Hajar Dewantara, Soepomo, serta lain-lainnya sebagai para perintis ke-merdekaan yang sangat memahami derita panjang dan perjuangan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda maupun oleh Jepang, yang mengakibatkan adanya berbagai kesenjangan ekonomi, kesenjangan ilmu pengetahuan dan kesenjangan taraf hidupnya, dan aneka kesenjangan lainnya.

Maka dari berbagai ragam kesenjangan yang ada, ditambah lagi dengan keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, budaya, agama dan seterusnya, maka para perintis kemerdekaan ini merasa perlu menciptakan Undang-Undang Dasar yang sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dan untuk tetap menyatukan bangsa yang berdomisili di kepulauan yang luas sebanyak lebih dari 13.000 pulau, maka diciptakanlah yang namanya Undang-Undang Dasar yang tentunya harus sangat cocok dengan bangsa Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh seorang professor yang tidak mementingkan diri sendiri, Prof Dr. Soepomo bersama-sama para tokoh perintis kemerdekaan lainnya. Kemudian, menyadari adanya keanekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat, suku, dan lain sebagainya, maka diciptakanlah simbol untuk mempersatukan bangsa, yakni Bhineka Tunggal Ika dimana peran Mohammad Yamin disini sangat menonjol. Bahwa, meski kita berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama: menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Lalu, Bung Karno pun -yang berdasarkan penggalian mendalam atas nilai-nilai luhur bangsa- melahirkan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari sinilah karakter bangsa itu lahir dimana Pancasila dan UUD Dasar 1945 sebagai landasan pijaknya. Dan ini semua harus disadari, dihayati, dan tentu saja diamalkan dengan baik. Jika tidak, maka berbagai permasalahan akan timbul dan kita senantiasa akan menjadi bangsa yang kehilangan arah. Karena itu, untuk mengatur berbagai masalah, berbagai kesenjangan bangsa, tak bisa tidak harus diwujudkan pembangunan karakter bangsa sebagaimana disebutkan di atas. Sebagaimana yang termaktub pada sila dalam Pancasila dan UUD 1945 hasil jerih payah, perjuangan, dan penghayatan yang mendalam dari para founding fathers republik ini.

Untuk itulah, Pak Harto berupaya memegang teguh Pancasila di dalam kepemimpinannya dalam membangun bangsa dan negara ini. Bagi Pak Harto, Pancasila merupakan pandangan hidup, ideologi, dan jati diri bangsa Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, Pancasila menurutnya haruslah menjadi satu-satunya landasan pijak kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagaimana dikemukakan Pak Harto;

"Usaha mengisi dan memberi makna pada ke-hidupan bangsa kita itu, dengan sendirinya, memerlukan sistem nilai yang dilandasi dan sekaligus mengarahkan pertumbuhan bangsa kita. Dan sistem nilai itu telah dirumuskan oleh para pendahulu kita secara padat dan padu di dalam Pancasila. Ia merupakan pandangan hidup, dasar falsafah negara dan ideologi nasional bangsa kita" 3

Menurut Pak Harto adalah suatu hal yang harus disyukuri bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, dasar falsafah negara dan ideologi nasional bangsa kita, dimana ia telah mem-perlihatkan keampuhannya dalam memelihara persatuan dan keutuhan Bangsa dan Negara. Pak Harto-pun me-ngatakan;

Pancasila yang diciptakan Bung Karno, yang lahir dari proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa, sesungguhnya diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa sendiri, dan menjadikannya sebagai ideologi bangsa.

Pada Kongres Pemuda, 28 Oktober 1974 Pak Harto juga memaparkan betapa penting dan berharganya Pancasila. Katanya :

"Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus difahami dan dihayati. Memahami dan menghayati ideologi Pancasila, agar dapat menga-malkannya dengan tepat dalam kehidupan Bangsa sehari-hari itulah tantangan Bangsa Indonesia, terutama pemuda dewasa ini."

"Saya minta kalian menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meresapi dan menjadi bagian dari darah daging kalian. Sebab hanya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah akan terwujud kebahagiaan bagi seluruh bangsa kita.

Dasar negara yang lain, Undang-Undang yang lain, mungkin cocok bagi bangsa lain; akan tetapi tidak pernah akan cocok dengan masyarakat kita. Karena, Pancasila dan UUD '45 itu adalah perasaan dari nilai-nilai luhur yang lahir, tumbuh dan menjadi kepribadian bangsa kita sendiri."

Mengapa Pancasila itu harus dihayati? Lebih lanjut kata Pak Harto lagi;

Karena pandangan hidup itu tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang baik di angan-angan saja. Pandangan hidup itu harus benar-benar memberi bimbingan kepada kita dalam memecahkan persoalan-persoalan nyata. Dengan demikian pandangan hidup tadi mempunyai makna dan wujud di dalam kehidupan... Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta memberi wujud yang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya masalah kita dimasa sekarang, melainkan merupakan masalah besar bagi kehidupan bangsa kita di masa datang."

Karena itu, pembangunan dan pembentukan karakter bangsa tak bisa tidak memang sangat diperlukan. Paling tidak, ini perlu disadari oleh para pemimpin bangsa yang ada sekarang ini. Jadi, tidak hanya memiliki ilmu penge-tahuan Barat (eropa dan Amerika) saja, melainkan juga berupaya menggali nilai-nilai dasar dari budaya bangsa sendiri.

Dan Pancasila diharapkan menjadi wujud dari karakter bangsa, benar-benar yang menjadi pegangan dan panduan dalam membangun bangsa. Para pemimpin bangsa ini seyogyanya harus kembali kepada karakter bangsa kita, kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Sebab, apabila karakter bangsa ini - Pancasila dan UUD 1945 - dihayati dan dilaksanakan, tentulah arah bangsa ini akan semakin jelas ke depannya. Karena itu, menurut Pak Harto bahwasanya demokrasi di Indonesia - dengan ragam suku bangsa, bahasa, dan budaya - tentulah berbeda dengan demokrasi di negara mana pun. Karena itu, ia menerapkan Demokrasi Pancasila (demokrasi dengan landasan Pancasila) adalah sebagai sebuah tata cara dalam kehidupan ber-demokrasi di tanah air. Demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa ini. Bukan demokrasi yang lain seperti di negara-negara barat, misalnya.

Akan halnya menurut Probosutedjo, sesungguhnya sila-sila di dalam Pancasila ini berkaitan satu sama lain. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima yang tersusun merupakan sebuah keharmonisan, dan mengandung makna untuk menyatukan bangsa, sehingga bisa mampu mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang abadi. Tidak terpecah, dan sesuai dengan jiwa dan watak bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Probosutedjo lagi;

Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Semua warga negara Indonesia tentunya adalah mereka yang mempunyai agama, menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara yang tidak ber-Tuhan atau atheis, diharuskan menganut salah satu agama yang ada, dan mereka bisa memilih Islam, Kristen (Katolik atau Protestan), Hindu dan Budha.

Maka, jika warga negara Indonesia yang mempunyai agama dan menganut keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, pasti memiliki rasa kasih sayang, toleran, perduli, dan tanggung jawab terhadap sesama manusia atau sesama warga negara Republik Indonesia. Jadi, bangsa ini sesungguhnya adalah bangsa yang beragama dan bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan bangsa atheis yang tidak mengenal agama.

Sila kedua adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ini artinya, bahwa orang-orang yang beragama (baca: mempunyai agama) sajalah yang memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki kemanusiaan yang adil, dan memiliki etika sebagai kaum beragama. Jadi, mereka yang tidak memiliki agama, warga negara yang atheis, otomatis adalah mereka yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan, tidak memiliki rasa keadilan dan etika. Karena itu ajaran PKI, ajaran komunis yang jelas tidak percaya akan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilarang di negeri ini.

Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia.

Sila ini yang menyatukan persatuan bangsa. Hanya manusia yang memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab yang bisa bersatu, saling hormat meng-hormati, tidak mementingkan diri sendiri dan bertanggung jawab.

Sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila ini sesungguhnya merupakan wujud dari model demokrasi yang tepat untuk bangsa ini, yakni berbentuk kerakyatan yang senantiasa dinaungi hikmah kebijaksanaan, yang senantiasa menjunjung azas musyawarah dan mufakat. Jadi, kita sesungguhnya tidak mengenal dominasi siapa yang kuat dialah yang menang, melainkan yang kuat justru sebaliknya membantu yang tidak kuat. Jadi, ada unsur kebersamaan dan mitra disini. Bukan untuk saling menekan. Bahwa demokrasi yang cocok untuk bangsa Indonesia yakni kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Bahwa warga negara yang sudah maju, yang berada dan sudah mampu harus memikirkan warga yang masih kurang mampu dan terbelakang. Karena pada dasarnya, setelah kita menghayati, memahami, dan melaksanakan sila pertama (Ketuhanan), sila kedua (Perikemanusiaan) dan sila ketiga (Persatuan), maka dengan sendirinya kita akan menyadari dan memahami sila keempat.

Sila Kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Muara dari sila-sila sebelumnya di atas, tak lain mewujudkan dalam bentuk keadilan sosial. Ini artinya, bahwa warga negara yang masih lemah, harus dilindungi, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, antara lain hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh tempat tinggal dan hak untuk menyekolahkan anak, hak untuk kesehatan atau berobat.

Jadi, dengan memahami, menghayati, dan me-laksanakan sila pertama sampai dengan sela keempat, maka akan terwujudlah keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan dengan sendirinya akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Lantas, apakah yang terjadi sekarang ini ? Tampaknya kita nyaris telah mengingkari dan mengabaikan karakter bangsa berdasarkan - Pancasila dan UUD 1945 - hingga cita-cita kemerdekaan dan amanat proklamasi hingga kini belum tercapai. Malah, kian lebih melenceng lagi, karena banyak yang tidak sesuai dengan jika UUD 1945 dan Pancasila.

Sekarang ini tiap individu, tiap warga negara, cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi, yang katanya berdasarkan demokrasi, kebebasan, dan mementingkan diri sendiri berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, dalam negara Pancasila, kepentingan bersama haruslah lebih didahulukan dan mengalahkan kepentingan individu. Karena kita hidup secara bersama-sama di antara kema-jemukan yang ada.

Kini para pemimpin bangsa ini juga cenderung tidak peduli terhadap nasib orang miskin, tidak peduli kepada para buruh, tani, dan nelayan yang nyata-nyata hidup dalam serba kekurangan. Hidup di bawah garis kemiskinan, yang sesungguhnya mereka merupakan warga negara dalam kemiskinan yang absolute. Sementara para pemimpin kita yang tergabung dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif seakan tak mau tahu.

Padahal, berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang asli, setiap pemimpin seharusnya-lah peduli terhadap arah dan nasib bangsanya, pemimpin harus bisa menjadi seorang teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Harus nampak hasil kerjanya, karya nyatanya, dan haruslah Ing arso sung tulodo, Ing madya bangun karso. Tuturi andayani."

Sebagaimana hal ini semua dilakukan oleh Pak Harto dalam pola kepemimpinannya. Budaya bangsa terus digali dan diamalkan. Atau bolehjadi benar kata Pak Harto di dalam kata sambutannya ketika memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, 19-12-1974 di Yogyakarta, dimana Pak Harto mengemukakan;

"Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila -lebih-lebih generasi yang akan datang—akan luntur. Mungkin Pancasila hanya akan tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa ini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila"⁵

Demikianlah, tinggal lagi sekarang kita bertanya, seberapa jauhkah kita sesungguhnya telah menyadari, menghayati, dan memahami nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila ? Seberapa jauhkah kita telah melaksanakan amanat di dalam UUD 1945 ? Apakah Generasi muda bangsa ini sudah mengenal dan memahami Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsanya sendiri ? Nah, inilah soalnya.

Dua Jasa besar Pak Harto

Harus diakui, sesungguhnya Pak Harto adalah aset bangsa. Selain para founding fathers, Proklamator RI Bung Karno dan Bung Hatta, sesungguhnya Pak Harto adalah juga pemimpin besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Bagi mereka yang mau mempelajari dan menengok jejak sejarah bangsa, atau mereka yang pernah hidup dan mengalami masa-masa pahit getir bangsa di masa lalu, pastilah akan menyetujui hal ini. Bahwa proses lahir dan tumbuhnya bangsa dan Negara Republik Indonesia, penuh pengorbanan jiwa dan raga, penuh pertumpahan darah di seantero pertiwi.

Selain sejumlah besar jasa-jasa dan pengabdian Pak Harto kepada bangsa ini⁶, ada dua jasa besar yang tak boleh dilupakan oleh bangsa ini, karena menyangkut eksistensi keberadaan bangsa, yaitu;

Pertama adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 dimana peristiwa ini - walaupun serangan dalam tempo singkat, namun mempunyai arti dan makna strategis. Pada waktu itu, pihak Belanda mengatakan kepada PBB, bahwa Negara Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Sudah bubar. Pemerintahannya sudah tidak ada karena para tokoh dan pemimpinnya sudah ditangkap, pemerintahan kosong. Tentara Nasional Indonesia juga sudah tidak ada dan sudah kocar-kacir karena sudah kehilangan kendali pimpinan. Bahwa pihak Belanda sepenuhnya telah mengendalikan Indonesia.

Tapi apa yang dilakukan Pak Harto ? Dengan segenap pasukan tentara bersama para pejuang dan bersama rakyat, pada 1 Maret 1949, secara mendadak melakukan serangan umum merebut kembali Yogyakarta. Membuat pihak Belanda terkejut,

dimana dengan aksi serangan umum itu Pak Harto memang ingin mengumumkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih ada, walau para pemimpinnya telah ditangkap Belanda.

Berita mengenai adanya aksi Serangan Umum 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Pak Harto itulah kemudian beritanya ditangkap oleh Radio India, yang kemudian menyiarkan berita tersebut ke seluruh dunia - terutama PBB - bahwa Pemerintah Indonesia memang masih ada. Dan Pemerintah Belanda dianggap telah berbohong kepada dunia.

Memang ada pihak-pihak yang mengatakan, bahwa Serangan Umum ini adalah inisiatif dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagaimana diceritakan oleh Masudi, seorang tokoh PKI, yang sangat tidak suka atas kesuksesan Pak Harto. Namun, faktanya Pak Harto lah yang melakukan inisiatif, melakukan serangan, Pak Harto lah yang berada di lapangan, memobilisasi kekuatan, dan memimpin langsung Serangan Umum 1 Maret 1949 itu.

Pak Harto memang melakukan keputusan yang berani saat itu, serta memiliki arti, peran, dan nilai strategis. Andai saja waktu itu Pak Harto tidak mempunyai keberanian untuk memimpin serangan umum tersebut, pastilah bangsa Indo-nesia tidak ada.

Kedua, adalah Penumpasan Pemberontakan G-30S/

PKI. Harus diakui arti penting dan strategis dari kepemimpinan Pak Harto - sebelum menjadi Presiden RI - adalah melakukan "perlawanan" kepada Bung Karno untuk segera membubarkan PKI. Ini karena PKI sudah berkhianat kepada bangsa dan negara berulang kali. Bahkan, ketika negara sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, Pak Harto mengingatkan Bung Karno bahwa musuh sebenarnya bangsa ini adalah PKI, karena jelas-jelas PKI telah menunjukkan gejala tidak sehat dengan menuntut Bung Karno agar mereka bisa mendirikan Angkatan Kelima, dimana kaum buruh dan tani agar dipersenjatai.

Bahkan ketika pemberontakan G30S/PKI terjadi, dimana sejumlah jenderal diculik dan dibunuh, yang salah satunya adalah Jenderal Achmad Yani - atasan langsung Pak Harto — Pak Harto juga meminta Bung Karno untuk membubarkan PKI. Namun, Bung Karno tetap saja menolak, hingga akhirnya Pak Harto mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan memimpin langsung operasi penumpasan pemberontakan G30S/PKI. Bahkan dengan mandat berupa Surat Perintah 11 Maret (Super Semar) Pak Harto membubarkan PKI.

Keputusan berani memang dilakukan Pak Harto seorang pada saat-saat genting di tahun 1965. Padahal waktu itu, masih banyak para jenderal lainnya seperti Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta, Mayjen Ibrahim Adjie sebagai Panglima Siliwangi, dan jendral-jenderal lainnya. Namun saat itu, memang hanya Pak Harto lah yang berani mengambil inisiatif dan keputusan melakukan perlawanan untuk menumpas kaum pem-berontak G30S/PKI. Dan itu Pak Harto juga berpangkat Mayor Jenderal, namun ia sangat berani membuat keputusan penting: Membubarkan PKI.

Dan seandainya pada tahun 1965 Pak Harto tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perlawanan, tidak mengambil keputusan, atau tidak membubarkan PKI, maka bisa ditebak apa jadinya nasib bangsa Indonesia bila dikuasai oleh PKI dengan ajaran-ajaran komunismenya. Tentulah Pancasila akan dibubarkan, UUD 1945 pasti akan dirubah, dan kaum agama dan alim ulama akan dibumi hanguskan, dibunuh atau dikejar-kejar. Karena PKI sebagai sebuah kekuatan sudah merasuk di segala lini, bukan saja di kalangan masyarakat luas dan elit politik, tapi juga di sejumlah kalangan tentara, Darat, Udara, Laut dan Kepolisian, bahkan juga terjelma secara nyata pada tentara Cakrabirawa, yakni satuan tentara pengawal Bung Karno.

Letkol Untung yang memimpin pemberontakan G30S/ PKI - dengan sebutan Ketua Dewan Revolusi — adalah pimpinan Cakrawabirawa, yang juga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan sadis para Jenderal TNI pada tanggal 30 September 1965 bersama unsur-unsur kekuatan PKI lainnya seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, dan yang lainnya. Dan bukti-bukti kebiadaban PKI ditemukan di sebuah lubang dimana mayat-mayat para Jenderal disiksa, dibunuh, dan dipotong-potong sedemikian rupa. Diluar rasa perikemanusiaan.

Memang, setelah pemberontakan Madiun, PKI untuk kesekian kalinya telah berkhianat pada bangsa dan negara. Setelah dibubarkan, PKI pun diburu oleh lawan-lawannya, oleh rakyat yang sejak lama menuntut PKI dibubarkan. Maka, pertumpahan darah memang tak dapat dielakkan. Karena itu, demi rasa kemanusiaan dan agar tidak terjadi saling bunuh dan pembunuhan atas PKI secara terus menerus, PKI pun sengaja dikumpulkan Pak Harto di pulau Buru. Ini artinya diamankan oleh Pak Harto, jangan sampai pembunuhan terus terjadi terhadap mereka demi rasa kemanusiaan. Bahkan, Pak Harto juga masih memberi perhatian pula kepada tahanan PKI di pulau Buru. Satu di antaranya, misalnya, Pak Harto pernah mengirimkan sebuah mesin tik kepada sastrawan Pramudia Anantatoer.⁷ Dan, pada masa kepemimpinan Pak Harto-pun sesungguhnya sudah banyak tahanan PKI yang dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat luas.

Memang banyak jasa dan pengabdian Pak Harto terhadap bangsa ini. Banyak keberhasilan dan kesuksesan yang dilakukan Pak Harto. Namun, masih saja ada pihak-pihak yang menganggap, bahwa segala keberhasilan Pak Harto bukanlah sesuatu yang istimewa karena hal ini juga dapat dilakukan oleh siapa pun. Bahwa apa yang dilakukan Pak Harto, keberhasilan Pak Harto, juga dapat dilakukan oleh orang lain.

Tapi kita tentu masih ingat cerita soal "Telur Columbus" dimana setelah Golombus - orang yang pertama kali — menemukan Benua Amerika, banyak orang yang men-cemoohnya dan menganggap enteng. Bahwa, siapa pun yang berlayar ke arah barat pasti dengan sendirinya akan menemukan benua Amerika.

Lalu, Columbus yang berani dan cerdas itu pun mengambil sebutir telur di tangannya. Dan dengan tenang ia mengatakan kepada para pencemooh dirinya : siapakah di antara kalian yang bisa mendirikan sebuah telur ? Tawaran Columbus ini tak bisa dijawab oleh para pencemooh, karena tak satu pun di antara mereka yang mampu mendirikan sebuah telur di atas meja.

Namun apa kata Columbus ? "Aku bisa," katanya. Apa yang dilakukan Columbus ? Penemu benua Amerika yang kesohor itu pun mengambil telur, dan memecahkan sedikit bagian bawah telur hingga telur tersebut bisa berdiri di atas meja. Dan semua orang pun terbelalak. Kagum. Tapi para pencemooh lagi-lagi bicara: "Ah, kalau gitu saja sih kami juga bisa...!". Tetapi Columbus menjawab; "Nah, kalau bisa, kenapa tidak kalian lakukan?".

Demikianlah, hari-hari panjang memang terasa melelahkan setelah Reformasi bergulir. Pengkhianatan dan hujatan memang dialami Pak Harto. Namun, mantan pemimpin bangsa ini lebih suka memilih diam dan tidak banyak bicara. Ia adalah orang yang memahami agama. Pak Harto juga telah menerima dengan ikhlas semua hujatan dan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Padahal Pak Harto sudah uzur, usianya sudah 86 tahun, dan juga sakit-sakitan. Akan halnya Prof. Dr. Quraisy Shihab pernah berkata, bahwa ada ayat yang mengatakan orang berusia diatas 80 tahun tidak lagi menanggung dosa atas perbuatannya. Dan bila orang tersebut terus dihujat, maka segala dosa-dosanya akan ditanggung oleh mereka yang melakukan hujatan.

Dan kini setelah setelah 9 tahun reformasi bergulir -termasuk amandemen UUD 1945 beberapa kali- perbaikan apakah yang dihasilkan untuk rakyat dengan 4 kali ganti Presiden ? Sementara kondisi objektif yang tampak: pengangguran, kemiskinan, tawuran horizontal, korupsi, kriminalisasi, politik tanpa pekerti, dan segerobak lagi persoalan masih menghantui kita - yang ini semua kerap diakomodir

oleh "kaum reformis" sebagai sebuah pelajaran (transisi) menuju demokrasi. Ada cost sosial yang mahal yang harus dibayar. Padahal kita semua tahu, demokrasi hanya bisa terwujud jika rakyat telah sejahtera. Jika kemiskinan dan penangguran tereliminasi, dan Civil Society telah terbangun dengan baik dan benar.

Dan yang penting Reformasi bukanlah pembiasaan akal-akalan politik, ajang prasangka, dan balas dendam. Juga, bukan mengedepankan salah satu rumusan politik: pengalihan perhatian publik. Sebab lagi-lagi Pak Harto akan selalu menjadi korbannya, sementara kita tahu, sesungguhnya masih banyak "ilmu" yang bisa kita pelajari dari pemimpin bangsa yang satu ini.

Jangan lagi malu-malu jika kita percaya kepada fakta, bukti dan kebenaran. Bahwa yang baik memang harus kita pertahankan, yang buruk kita buang, dan yang kurang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Atau, jangan-jangan kita sekarang telah menganut pepatah: Habis manis sepah dibuang ? Apakah kita tak lagi memiliki hati nurani sebagai manusia dan umat Tuhan Yang Maha Kuasa ? Ataupun kita sebagai warga bangsa telah kehilangan nilai-nilai luhur dalam berbudaya ? Wallahu Alam bissawab.

Ikhtisar Dan Kesimpulan

1. Sebagai pemimpin bangsa, Pak Harto telah banyak meninggalkan jejak dalam bukti-bukti keberhasilan untuk bangsa, baik dalam bentuk pembangunan fisik material maupun bentuk non fisik yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dan rakyat pun bisa merasakannya hingga kini.
2. Pak Harto sangat mengutamakan Pancasila karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Landasan idiil dan moral dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila, sesungguhnya berkaitan satu sama lain. Karena itu, sebuah Karakter Bangsa - berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 — perlu diwujudkan oleh bangsa ini guna mengatasi pelbagai permasalahan dan dapat menjadi panduan.
3. Disamping jasa-jasa dan pengabdian lainnya, ada dua jasa besar Pak Harto terhadap eksistensi bangsa ini, yakni Serangan Umum 1 Maret 1949, dan Penumpasan Pemberontakan G30 S/PKI serta membubarkan PKI. Pak Harto berani membuat keputusan penting dan strategis, sekaligus mampu melaksanakannya.

Catatan Kaki

1. Penuturan Probosutedjo, Bandung, 2 Mei 2007
2. Lihat buku "Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto", Jakarta Citra, Juni 2006, yang menyajikan pelbagai keberhasilan dan pendapat mengenai Pak Harto
3. Sambutan Pak Harto pada Peserta Penataran Pemuda Angkatan ke-I, 27 Juni 1979 di Jakarta,
4. Pandangan Presiden Soeharto tentang PANCASILA, CSIS Jakarta, Juli 1976, hal.15
5. Pandangan Presiden Soeharto tentang PANCASILA, CSIS Jakarta, Juli 1976, hal.16
6. Simak pelbagai jasa, pengabdian dan berbagai kelebihan Pak Harto dalam buku "Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto", Jakarta Citra, 2006
7. Dengan memberi mesin tik, Pak Harto berharap agar Pram tetap meneruskan kegiatan kreatifnya sebagai sastrawan. Bahkan, setelah menerima hadiah mesin tik dari Pak Harto, Pram juga sempat mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Pak Harto.